



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMIN**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN ALUMNI**
3. NHK : **96792**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 680.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 993 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 1552 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 296.850.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 250.000
3. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. MOBIL, HONDA STREAM Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



6. MOTOR, SUZUKI FU150SCD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.030.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 612.576.984

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.639.456.984

III. HUTANG Rp. 2.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.639.454.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.